

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah, merupakan bentuk pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi. Desentralisasi dianggap sebagai suatu alat kebijakan pemerintah yang efektif dalam menangani sejumlah masalah yang berkaitan dengan stabilitas dalam suatu Negara. Dalam rangka mewujudkan stabilitas tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 menyatakan bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah daerah memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan daerah yang cukup besar.

Alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka desentralisasi. Sifat DAU adalah "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan DAU untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD.

Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004). Wong (2004) dalam Adi dan Harianto (2007) menunjukkan bahwa infrastruktur industry mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah meningkatkan pengeluaran belanja modal untuk pembangunan, karena peningkatan investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan public.

Menurut Nordiawan (2006), Belanja Modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh asset tetap, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lainnya, dan dengan membeli. Namun, dalam pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri dan membeli. Harianto dan Adi (2007)

menyatakan bahwa alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Sehingga tercermin dalam pendapatan per kapita yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pendapatan Perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau wilayah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita (Adi dan Harianto, 2007).

Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ke tahun berikutnya diprosikan dengan PDRB (Situngkar, 2009), semakin tinggi PDRB suatu daerah berarti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Barata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang terdiri dari PAD dan Bagian sumbangan dan bantuan. Namun demikian, penelitian tersebut belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dengan pertumbuhan ekonomi dapat saja

mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

Dengan berlakunya desentralisasi serta adanya transfer dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu untuk mengembangkan daerahnya. Harapan utama yang ingin dicapai adalah terus meningkatnya Pendapatan per Kapita masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per Kapita yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola belanja, pendapatan serta pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut diatas dengan judul **“Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per kapita, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi?

3. Apakah PAD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi?
4. Apakah Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal?
2. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per kapita, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi?
3. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi?
4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota/pemerintah kabupaten tentang Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi.
 - b. Memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Manfaat di bidang praktik

- a. Sebagai bahan referensi bagi penulis tentang Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memahami hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi.